



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Monitoring dan Evaluasi Berbasis Pendekatan Hibrida Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Pasca Keracunan Siswa-Siswi

jaelani

Universitas Terbuka, Lampung, Indonesia, jaelanip99@gmail.com

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan serius di beberapa daerah, belasan ribu anak mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida terhadap program Makan Bergizi Gratis serta menganalisis kemungkinan hambatan yang akan muncul dalam penerapan strategi tersebut. Melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah serta publikasi daring lainnya, ditemukan bahwa penyebab keracunan siswa-siswi adalah karena lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang belum mampu mengintegrasikan kendali pemerintah pusat dengan adaptasi daerah secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan empat strategi monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida, seperti pengembangan indikator kinerja monitoring dan evaluasi yang adaptif terhadap kondisi lokal, pelaksanaan monitoring melalui inspeksi mendadak, evaluasi melalui rapat lintas sektor, serta digitalisasi dalam proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi. Namun, peneliti memprediksi tiga hambatan yang akan muncul dalam pelaksanaan strategi tersebut, seperti potensi kebocoran jadwal inspeksi mendadak akibat lemahnya integritas aparatur, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, dan ketidakmerataan infrastruktur digital dalam mendukung implementasi sistem pelaporan nasional.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Keracunan Makanan, Monitoring dan Evaluasi, Pendekatan Hibrida.

*Correspondence Address:	jaelanip99@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	5/21/2026 7:51:00 AM	-	9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini dirancang sebagai upaya negara untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah dasar hingga menengah. Tujuan utama program ini adalah menjamin setiap peserta didik memperoleh makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang sebagai prasyarat tumbuh kembang fisik dan kognitif yang optimal. Melalui program MBG, pemerintah berharap dapat memperkuat fondasi kesehatan generasi muda sekaligus menurunkan angka stunting secara nasional dalam kerangka menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan serius di beberapa daerah. per 19 Oktober 2025 sebanyak 13.168 anak mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi

makanan dari program tersebut (Shaloho, 2025). Insiden ini menimbulkan keprihatinan publik dan menggugah kesadaran bahwa idealisme kebijakan belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan serius yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait kasus keracunan massal yang menimpa ribuan peserta didik di berbagai daerah. Lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam rantai pengawasan menyebabkan pengendalian mutu pangan tidak berjalan optimal, sehingga risiko kontaminasi meningkat (Rahmah et al., 2025). Kemudian, karakter kebijakan MBG yang terlalu bersifat top-down membuat daerah kesulitan melakukan penyesuaian teknis sesuai kapasitas dan kondisi lokal (Rosidin et al., 2025). Insiden keracunan tersebut merupakan cerminan dari belum terpenuhinya tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas pangan yang aman dan sehat sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara (Riyanto & Sinaga, 2025). Belum adanya sistem pengawasan terpadu yang memastikan keamanan makanan sejak tahap perencanaan hingga distribusi, menyebabkan timbulnya celah dalam implementasi sehingga berujung pada kegagalan perlindungan konsumen (Qomarrullah et al., 2025). Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan MBG bukan terletak pada rancangan kebijakannya, melainkan pada lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang belum mampu mengintegrasikan kendali pemerintah pusat dengan adaptasi daerah secara efektif. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan implementasi yang lebih kolaboratif dan adaptif, seperti pendekatan hibrida, agar kebijakan MBG dapat berjalan aman, terukur, dan sesuai dengan konteks pelaksanaannya di lapangan.

Oleh karena itu, dalam menjawab berbagai persoalan implementatif tersebut, pendekatan hibrida menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan hibrida merupakan model sintesis yang memadukan kekuatan pendekatan top-down dan bottom-up dengan menekankan fleksibilitas dan adaptasi terhadap konteks lokal (Saptawan et al., 2020). Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh arahan struktural dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana di tingkat daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, kelembagaan, dan sumber daya yang dimiliki. Sejalan dengan itu, pendekatan hibrida dipandang sebagai kerangka analitis terpadu yang mengombinasikan dimensi struktural dan sosial secara sistematis, sehingga memungkinkan koordinasi lintas aktor, komunikasi dua arah, serta umpan balik yang berkelanjutan antara pusat dan daerah (Kawer et al., 2018). Dalam konteks Program MBG, teori ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang mampu mengintegrasikan pengawasan pusat dengan partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program tidak hanya konsisten dengan standar nasional, tetapi juga adaptif terhadap dinamika lokal dan berorientasi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Belajar dari pengalaman implementasi di sejumlah daerah yang menghadapi persoalan keamanan pangan, pemerintah daerah yang baru memulai pelaksanaan program memiliki kesempatan strategis untuk menata sistem pelaksanaannya sejak dini agar lebih siap dan terarah. Salah satunya adalah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang mulai mengimplementasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025 secara bertahap di tingkat lokal. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah membangun 18 dapur pengolah makanan bergizi yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total target 55 dapur yang direncanakan (Sayuti, 2025). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional melalui pembangunan infrastruktur dan kelembagaan yang menjadi dasar keberhasilan pelaksanaan program. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, posisi Tanggamus yang masih berada pada fase awal pelaksanaan justru memberikan peluang penting untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida, yakni suatu model pengawasan yang mengintegrasikan arahan kebijakan pusat dengan kapasitas pelaksana di tingkat lokal. Dengan menerapkan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga,

meningkatkan efektivitas pengawasan mutu pangan, serta mencegah terulangnya permasalahan implementasi seperti yang terjadi di wilayah lain. Oleh karena itu, Tanggamus dapat dijadikan landasan empiris untuk menguji dan merekomendasikan penerapan model monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program MBG di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida terhadap program Makan Bergizi Gratis serta menganalisis kemungkinan hambatan yang akan muncul dalam penerapan strategi tersebut.

METODE | METHOD

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode literature review dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah (Ridwan dkk., 2021) mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbit pada periode 2020-2025. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran di Google Scholar. Tahapan pengumpulan dimulai dari identifikasi artikel yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria seperti tahun terbit, kesesuaian tema, serta validitas sumber. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan kajian yang kredibel dan mutakhir sehingga hasil analisis dapat menggambarkan kondisi terkini mengenai pelaksanaan dan dampak Program MBG di Indonesia.

Dalam konteks literature review, teknik pengumpulan data tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup proses evaluasi dan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya. Peneliti menelaah teori, temuan empiris, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian terdahulu untuk membangun kerangka konseptual yang kuat. Setiap literatur yang dikumpulkan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi metode penelitian, kesenjangan penelitian (research gap), hasil temuan, serta kontribusi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui literature review tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh data sekunder, tetapi juga sebagai langkah analitis dalam membangun dasar ilmiah yang komprehensif untuk memahami efektivitas dan tantangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Langkah-Langkah Konkret dalam Monitoring dan Evaluasi Berbasis Pendekatan Hibrida

a. Pengembangan Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi yang Adaptif terhadap Kondisi Lokal oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Pengembangan indikator kinerja dalam Program Makan Bergizi Gratis perlu mencakup dua kategori utama, yaitu indikator monitoring dan indikator evaluasi, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan keamanan dan mutu pangan. Indikator monitoring digunakan untuk memantau pelaksanaan program secara jangka pendek ketika kegiatan distribusi dan konsumsi sedang berlangsung, seperti ketepatan waktu pengiriman makanan, kondisi fisik makanan saat tiba di sekolah, serta kepatuhan SPPG terhadap prosedur pelayanan. Sementara itu, indikator evaluasi disusun untuk menilai dampak dan konsistensi pelaksanaan dalam jangka lebih panjang, misalnya evaluasi mingguan melalui parameter seperti tren keluhan kesehatan siswa, efektivitas distribusi, dan stabilitas kualitas menu dari waktu ke waktu. Pemerintah pusat menetapkan indikator umum sebagai acuan nasional, sedangkan pemerintah daerah mengadaptasikannya dengan kondisi lokal seperti akses pangan daerah, kapasitas UMKM, dan karakteristik sekolah. Integrasi indikator pusat dan daerah ini mencerminkan pendekatan hibrida yang memungkinkan penilaian pelaksanaan program secara lebih komprehensif. Indikator monitoring memastikan proses berjalan sesuai rencana harian, sedangkan indikator evaluasi memberikan gambaran apakah hasil dan dampak program telah memenuhi target keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan demikian,

sistem indikator yang adaptif ini memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi penyimpangan, melakukan koreksi berbasis bukti, serta menjaga keberlanjutan program secara konsisten.

b. Pelaksanaan Monitoring melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap Kantor SPPG dan Sekolah Penerima Manfaat

Monitoring juga diperkuat melalui pelaksanaan inspeksi mendadak yang secara strategis dibagi ke dalam dua tim. Tim pertama melakukan sidak ke kantor atau dapur SPPG sebagai lokasi pengolahan makanan, sedangkan tim kedua melakukan sidak langsung ke sekolah sebagai titik distribusi dan konsumsi. Pembagian ini dibuat untuk memastikan bahwa pengawasan mencakup seluruh rantai proses, mulai dari tahap produksi hingga penyajian makanan kepada siswa. Sebagai bentuk pengawasan mendadak, sidak dilaksanakan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak SPPG maupun sekolah agar kondisi operasional yang ditemukan mencerminkan keadaan sebenarnya, bukan situasi yang telah direkayasa untuk keperluan pemeriksaan. Pelaksanaan sidak dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari aktor pusat (seperti BGN dan BPOM) dan aktor daerah (seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) serta perwakilan masyarakat seperti komite sekolah ataupun organisasi yang peduli terhadap keamanan pangan anak. Pendekatan hibrida ini menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya mengandalkan otoritas formal pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor sosial masyarakat, sehingga monitoring dapat menangkap potensi risiko keracunan baik di dapur SPPG maupun di sekolah dengan cakupan yang lebih luas dan objektif.

c. Evaluasi melalui Rapat Lintas Sektor yang Mengintegrasikan Laporan Masyarakat, Sekolah, dan Pelaksana Program

Pada tahap evaluasi, pemerintah daerah menyelenggarakan rapat lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, SPPG, dan perwakilan masyarakat untuk menilai dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh. Rapat ini menjadi ruang bagi masyarakat dan sekolah untuk menyampaikan laporan terkait kendala konsumsi, keluhan siswa, atau temuan lapangan yang tidak tercatat dalam laporan administratif. Pendekatan ini menunjukkan karakter hibrida karena proses evaluasi tidak hanya menggunakan data kuantitatif dari pemerintah daerah, tetapi juga memperhitungkan pengalaman, persepsi, dan informasi informal dari berbagai aktor di lapangan. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, evaluasi menjadi lebih komprehensif dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan program, termasuk potensi penyebab terjadinya keracunan. Hasil rapat lintas sektor ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk rekomendasi tindak lanjut yang lebih kontekstual dan realistis.

d. Digitalisasi dalam Proses Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat kepada Pemerintah Pusat

Digitalisasi menjadi komponen penting dalam memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama dalam memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilaporkan secara sistematis, terstandar, dan segera diterima (real time) oleh pemerintah pusat. Setelah pemerintah daerah melaksanakan proses monitoring dan evaluasi serta menyepakati tindak lanjut bersama lintas sektor (misalnya perbaikan prosedur SPPG, penyesuaian menu, atau peningkatan mekanisme pengawasan), seluruh hasil tersebut wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar untuk pengambilan langkah kebijakan pada tingkat nasional. Untuk mendukung proses pelaporan ini, pemerintah pusat perlu menyediakan infrastruktur digital yang memadai serta membangun sebuah website khusus yang memungkinkan setiap daerah mengunggah hasil monitoring dan evaluasi secara berkala dan terintegrasi (penulis mengajukan sebuah nama websitenya e-Monev MBG). Formulir digital dalam website tersebut harus dirancang fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga variasi indikator, kapasitas SPPG, dan karakteristik

wilayah tetap tercermin dalam pelaporan. Selain platform pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat juga seharusnya menyediakan website terpisah khusus untuk menerima laporan pemantauan dari masyarakat (penulis juga mengajukan nama websitenya Monitor MBG), terutama orang tua peserta didik yang melaporkan gejala keracunan atau ketidaksesuaian menu. Melalui pendekatan hibrida yang menggabungkan pelaporan formal pemerintah daerah dan masukan langsung dari masyarakat, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika program dan merumuskan kebijakan korektif secara cepat, terkoordinasi, dan berbasis bukti.

2. Faktor-Faktor yang diprediksi menjadi Hambatan dalam Implementasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Pendekatan Hibrida

a. Potensi Kebocoran Jadwal Inspeksi Mendadak akibat Lemahnya Integritas Aparatur

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi monitoring berbasis pendekatan hibrida adalah potensi kebocoran jadwal inspeksi mendadak yang disebabkan oleh lemahnya integritas sebagian aparaturnya pemerintah. Dalam praktik birokrasi di daerah, relasi informal antarpegawai (misalnya pertemanan antara petugas monitoring dengan pegawai SPPG atau tenaga kependidikan di sekolah) berpotensi menimbulkan bocornya informasi mengenai waktu pelaksanaan sidak (disampaikan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa). Jika hal ini terjadi, kondisi operasional di SPPG maupun di sekolah dapat direayasa sehingga tidak mencerminkan situasi sebenarnya. Kebocoran jadwal sidak tidak hanya mengurangi objektivitas hasil monitoring, tetapi juga menghambat upaya mendeteksi penyimpangan proses yang dapat menyebabkan kasus keracunan.

b. Rendahnya Tingkat Kepedulian Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Hambatan lain yang diprediksi muncul adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam konteks monitoring partisipatif. Dalam banyak daerah, masyarakat (termasuk orang tua peserta didik) masih cenderung menganggap bahwa pengawasan mutu makanan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka tidak mau terlibat dalam pelaporan atau pemantauan langsung. Minimnya kepedulian ini berdampak pada rendahnya aliran informasi dari masyarakat kepada pemerintah terkait potensi gejala keracunan, ketidaksesuaian menu, atau distribusi yang tidak tepat waktu. Padahal, dalam pendekatan hibrida, peran masyarakat sangat penting untuk melengkapi data kuantitatif pemerintah melalui laporan-laporan kualitatif yang berasal dari pengalaman nyata.

c. Ketidakmerataan Infrastruktur Digital dalam Mendukung Implementasi Sistem Pelaporan Nasional

Pendekatan hibrida yang mengintegrasikan platform digital nasional dengan pelaporan daerah dan partisipasi masyarakat juga menghadapi tantangan yang besar terkait ketidakmerataan infrastruktur teknologi. Wilayah perkotaan umumnya telah memiliki jaringan internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, serta literasi teknologi yang lebih tinggi, sehingga proses pelaporan monitoring dan evaluasi dapat berjalan lancar. Sebaliknya, daerah pedesaan dan daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan signifikan seperti minimnya akses jaringan, ketidaktersediaan perangkat gawai, atau rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pelaporan digital. Kondisi ini membuat implementasi platform seperti e-Monev MBG atau Monitor MBG tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah. Ketimpangan infrastruktur tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan data, atau bahkan ketiadaan laporan dari daerah tertentu, sehingga pemerintah pusat tidak memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas program maupun risiko keracunan di berbagai wilayah.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis disebabkan oleh belum adanya sistem pengawasan terpadu yang memastikan keamanan makanan sejak tahap perencanaan hingga distribusi. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis mengajukan sebuah konsep monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida, yang mengombinasikan antara koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Penulis merumuskan empat langkah konkret monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida yang meliputi pengembangan indikator kinerja monitoring dan evaluasi yang adaptif terhadap kondisi lokal oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan monitoring melalui inspeksi mendadak (sidak) terhadap kantor SPPG dan sekolah, evaluasi melalui rapat lintas sektor yang mengintegrasikan laporan masyarakat, sekolah, dan pelaksana program, serta digitalisasi dalam proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah daerah dan masyarakat kepada pemerintah pusat. Namun, penulis memprediksi tiga faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis pendekatan hibrida, yaitu potensi kebocoran jadwal inspeksi mendadak akibat lemahnya integritas aparatur, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, dan ketidakmerataan infrastruktur digital dalam mendukung implementasi sistem pelaporan nasional. Oleh sebab itu, penulis memberikan saran agar pemerintah menyusun pakta integritas khusus bagi petugas monitoring untuk mencegah kebocoran jadwal inspeksi mendadak, peningkatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam monitoring, dan pemerataan pembangunan infrastruktur digital untuk mendukung implementasi sistem pelaporan monitoring dan evaluasi Berbasis Hibrida.

REFERENSI | REFERENCE

- Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Pendekatan Hibrida di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*. *Sosiohumaniora*, 20(3), 245-253.
- Qomarrullah, R., Suratni, S., Wulandari S, L., & Sawir, M. (2025). *Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan*. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). *Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025*. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855-2866.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). *Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah*. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). *Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari Tanggung Jawab Negara*. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1-11.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). *Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten*. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131-143.
- Saptawan, A., Ammar, M., & Susilowati, R. (2020). *Model Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan*. *Socio Humaniora*, 1(1), 1-11.
- Sayuti, S. (2025). *Tanggapus Tambah Satu Dapur MBG di Pekon Teba, Total 18 SPPG*. Website Kupastuntas.
- Shaloho, M. R. (2025). *Angka Kasus Keracunan Program MBG terus Meningkat, Ethics of Care: Bukan Sekadar Statistik, tapi Potret Kegagalan Sistemik*. Website Tajdid.